

JADUAL RAPAT
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKARAYA

Rencana Pelaksanaan Kegiatan:

1. Rapat Evaluasi Triwulan I akan dilaksanakan pada bulan April 2024 (tanggal menyesuaikan).
2. Rapat Evaluasi Triwulan II akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 (tanggal menyesuaikan).
3. Rapat Evaluasi Triwulan III akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 (tanggal menyesuaikan).
4. Rapat Evaluasi Triwulan IV akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 (tanggal menyesuaikan).
5. Untuk Rapat Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Rapat-rapat lain yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Palangka Raya, 02 Januari 2024
Sekretaris DP3APPKB Prov Kalteng



Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

NOTULEN RAPAT
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKARAYA

- A. Pelaksanaan Rapat** : Tanggal, 18 April 2024
- B. Pimpinan** : Sekretaris Dinas DP3APPKB
- C. Peserta** : Kepala bidang, Kepala UPT dan Tim Perencanaan diLingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- D. Perihal** : Evaluasi Triwulan I Tahun 2024

Hasil Rapat :

PAGU APBD	Rp.17.984. 560.982
- PAGU BELANJA OPERASI	Rp.16.931.573.320
- PAGU BELANJA MODAL	Rp. 1.052.987.662

REALISASI sampai Tanggal 18 April 2024.:

BELANJA OPERASI

- Keuangan Rp. 2.889.402.319 (17,07 %)
- Realisasi Fisik (%)

BELANJA MODAL

- Keuangan Rp. 532.000.000 (50,52 %)
- Realisasi Fisik (%)

REALISASI APBD

- Keuangan Rp. 3.421.402.319 (19,02 %)
- Realisasi Fisik (%)

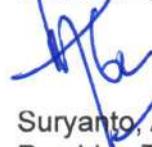
Rencana Pelaksanaan Kegiatan:

1. Kegiatan bidang 1 akan dilaksanakan pada bulan April 2 kegiatan.
2. Kegiatan bidang 2 mulai pada bulan Mei (rangkaian HUT Kalteng)
 - Pameran 11-19 mei 2024.
 - Pawai 19 mei 2024.

Kepala UPT Bidang diLingkungan:

3. Kendala Honor PPID dari Provinsi terbatas hanya 7 org, sedangkan yg termasuk anggota PPID DP3APPKB ada 25 org.
Solusi: Honor yang diterima akan dikelola dan akan dibagi agar semua anggota dapat Honor.
4. Kegiatan bidang 4 kegiatan Sosialisasi ke 3 kabupaten (Barut, Sukamara dan Kobar) akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2024.
5. Pengadaan Intercom akan dialihkan ke Wearlas, LCD dan mesin potong rumput.
6. Untuk UPT pada tahun ini akan mendapatkan lemari arsip, sekat ruangan.
7. Perbaikan Toilet realisasi pada perubahan.
8. UPT APBD sudah realisasi 15,37% Rp. 54.037.894
9. UPT DAK NF & APBD sudah realisasi 18,95% Rp. 108.069.900
 - Kegiatan Pelatihan penanganan Kasus dan Simponi pada tanggal 22-25 April 2024.
 - Sosialisasi 02 Mei 2024 Rangkaian HUT KALTENG sasaran peserta 406 org.
 - Sasaran petugas pemberi layanan di kab/kota se Kalimantan Tengah.
 - Kegiatan Pelayanan anggaran utk 1 tahun, jadi realisasi menyesuaikan.
 - DAK NF sesuai juknis tidak ada untuk Honorarium.
 - Panjar kegiatan???
10. Anggaran Pameran, Ekspo dan Sosialisasi direncanakan TUP
11. Kendala sosialisasi di kabupaten terkait ST Eselon III.
12. Pertemuan Perencanaan:
 - Akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.
 - Peserta yg diundang
 - . kab/kota 2 org (ditanggung penginapan, ruang rapat dan makan minum selama kegiatan).
 - . provinsi Eselon III dan Tim Operator Dinas P3APPKB Prov Kalteng (peserta mendapatkan uang harian 1 hari)
13. Rakorda Dinas akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.
 - Akan diadakan Desk per indikator.
 - Desk akan di tambah untuk UPT PPPA.
 - Penjelasan utk Slot SDM.
14. Komunikasi berjenjang.
15. Peminjaman tempat untuk Studi tiru Forum Puspa.

Pimpinan Rapat
Sekretaris,



Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

NOTULEN

Sidang/Rapat : Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Surat Undangan : Via Whatshap Grub
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB
Acara : Rapat Evaluasi TW 2 dan Rencana Kegiatan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : SURYANTO, Aks., M.Si
Sekretaris : -
Pencatat : Tim Perencanaan
Peserta Sidang/Rapat : Sekretariat, Bidang, UPT-PPPA dan Tim Perencanaan
Kegiatan Sidang/Rapat : Rapat Persiapan Rakorda
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil Rapat:

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

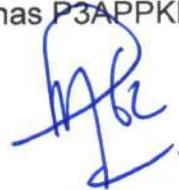
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Capaian Triwulan II		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96	81,94	81,98	100,05 %
2	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	Kab /kota	14	6	3	50%

3	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100 %	96 %	104,16%	104,71%
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	63,68	63,68	63,68	100%
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	90%	90%	90%	100%
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	64,55	64,55	62,55%	96,90%
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,28	101,33
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	A	112,5%

Rencana Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Rakorda Dinas P3APPKB Provinsi yang semula direncanakan tanggal 7, 8 dan 9 Agustus 2024 ditunda menjadi tanggal 12, 13 dan 14 Agustus 2024.
2. Tempat kegiatan, Narasumber dan prosedur sementara tidak ada perubahan.
3. Peserta undangan yang semula 4 orang per kab/kota ditambah menjadi 5 orang per kab/kota dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretaris Daerah kab/kota
 - Bappedarida kab/kota
 - Kepala Dinas P3APPKB kab/kota
 - Kepala UPT- PPPA Dinas P3APPKB kab/kota
 - Petugas Penanganan Kasus (tambahan)
4. Segera diajukan surat revisi kegiatan.
5. Kegiatan pembinaan pegawai yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2024 ditunda menjadi tanggal 01 Agustus 2024.

Pimpinan Rapat Sekretaris
Dinas P3APPKB Prov. Kalteng



Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

DOKUMENTASI



NOTULEN RAPAT
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKARAYA

- A. Pelaksanaan Rapat** : Tanggal, 7 Oktober 2024
- B. Pimpinan** : Sekretaris Dinas DP3APPKB
- C. Peserta** : Kepala bidang, Kepala UPT dan Tim Perencanaan diLingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- D. Perihal** : Evaluasi Triwulan III Tahun 2024

Hasil Rapat :

Target Realisasi Kinerja Triwulan III

No.	Sasaran strategis	Indikator KinerjaUtama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	81,94	81,94	81,98	100,05 %
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	Kab/kota	14 Kab/kota	8	7	87,5%
3.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100%	95%	102%	103,82%
4.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	63,68	63,68	63,68	100%
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90%	90%	90%	100%

5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	persen	64,55 %	64,55 %	62,55%	96,90 %
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	Total Fertily Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,28	101,33
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	BB	BB	A	112,5%

Kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
2. Perlunya dukungan, advokasi dan anggaran dalam pencapaian target di Kalimantan Tengah, terutama dalam Peningkatan Perekonomian Perempuan
3. Kontribusi dalam ekonomi dan segi sumbangan pendapatan perempuan perlu ditingkatkan lagi.
4. Perlunya dukungan dan kerjasama antara SOPD terkait dalam hal penyediaan Data.
5. Menambah jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan melibatkan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi;
6. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
8. Penambahan Anggaran baik dari APBD maupun DAK untuk : Upaya Pencegahan dengan melakukan Perumusan Kebijakan, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Sosialisasi serta Advokasi; penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelayanan serta Penjangkauan Kasus;
9. Peningkatan Kapasitas SDM pada Unit Layanan dengan mengadakan atau mengikutsertakan pada Pelatihan Bersertifikasi.
10. Pengajuan usulan bantuan berupa Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak dan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian PPPA RI kepada UPTD PPA di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki Torlin dan Molin dalam rangka mendukung pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan di daerah

11. Perlunya dukungan sosialisasi advokasi dan anggaran dalam pencapaian indikator.
12. Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus memerlukan koordinasi.
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah.
14. Perlunya advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk peningkatan, pemahaman tentang Hak Anak dalam lintas sektor terkait Gugus Tugas KLA.
15. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait klaster 1-5 dan Kelembagaan dalam pengumpulan data untuk penilaian Evaluasi KLA.
16. Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi KLA
17. Terlaksananya bimtek KHA bagi SDM disetiap klaster untuk kabupaten/kota
18. Bertambahnya SRA, RIRA, PRAP, RBRA, PISA dan PKA yang terstandardisasi.
19. Terlaksananya pelatihan 2P (Pelopor dan Pelapor) bagi Forum Anak
20. Terlaksananya pelatihan PATBM di kabupaten/kota sebagai bagian dari kelurahan/desa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
21. Dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah kabupaten/kota guna pencapaian KLA
22. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi maupun kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

Pimpinan Rapat
Sekretaris,



Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

DOKUMENTASI



NOTULEN RAPAT
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKARAYA

- A. Pelaksanaan Rapat** : Tanggal, 06 Januari 2025
- B. Pimpinan** : Sekretaris Dinas DP3APPKB
- C. Peserta** : Kepala bidang, Kepala UPT dan Tim Perencanaan diLingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- D. Perihal** : Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Hasil Rapat :

Target Tahun 2024 masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Target 2024
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan	(indeks)
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,94
2.	Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	(Kab/kota)
	- Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	14
3.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	(persen)
	- Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100
4.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak	(indeks)
	- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,68

- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	(persen) 90
--	----------------

5. Meningkatkan kualitas keluarga	(persen)
- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55
- Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,25

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	(skor) BB
--	--------------

Capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96	81,96	79,99	98 %
2	Mengoptimalkan Kualitas	Jumlah ketersediaan	Kab /kota	14	14		

	Data pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Data Tingkat kab/kota				14	100%
3	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100 %	100%	100%	102,11% (Kompilasi capaian TW I, TW II, TW III dan TW IV dibagi 4).
4	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	63,68	63,68	63,68	100%
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	90%	90%	90%	100%
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	64,55	64,55	62,55%	96,90%

		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,25	2,28	98,68%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	A	112,5%
Total skor:		808,19					
Rata-rata:		101,024%					

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan IV adalah :

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses bagi perempuan dalam pembangunan, memperoleh pendidikan dan pelatihan.
3. Aplikasi SIGA dalam pemeliharaan sampai saat ini.
4. Data terpilah dari SOPD belum tersedia.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling;
6. Kurang maksimalnya unit layanan pada kabupaten/kota;
7. Petugas Operator Simfoni PPA Kabupaten/ Kota masih belum sepenuhnya meng input layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA;

8. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
10. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan KLA. Di tahun 2023 ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan KLA, 4 (empat) Kabupaten mendapat predikat pramata (Kapuas, Katingan, Kotim, dan Sukamara) dan 2 (dua) kab dan 1 (satu) kota yang mendapat predikat Madya (Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Kobar).
11. SDM di Kab/kota yang mengalami mutasi dan kekurangan tenaga SDM yang memahami KLA.
12. SDM dari belum memiliki sertifikat KHA.
13. Minimnya fasilitasi atas informasi layak anak.
14. Kurangnya sosialisasi terkait FAD sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
15. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerinath kabupaten/kota untuk pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota.
16. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.
17. Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan belum optimalnya peran kelembagaan Perlindungan Hak Anak .

Pimpinan Rapat
Sekretaris,



Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

NOTULEN

Sidang/Rapat : Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024
Surat Undangan : Via Whatshap Grub
Waktu Sidang/Rapat : 08.00 WIB
Acara : Rapat Perubahan Kegiatan Rakorda 2024
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : dr. Linae Victoria Aden, M., Mkes
Sekretaris : Suryanto, Aks., M.Si
Pencatat : Tim Perencanaan
Peserta Sidang/Rapat : Sekretariat, Bidang dan Tim Perencanaan
Kegiatan Sidang/Rapat : Rapat Perubahan Kegiatan Rakorda 2024
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil Rapat:

1. Rakorda Dinas P3APPKB Provinsi yang semula direncanakan tanggal 12, 13 dan 14 Agustus 2024 ditunda menjadi tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2024 atas arahan dari pimpinan.
2. UMKM yang akan mengisi bootd yang awalnya 6 UMKM Karena penundaan tanggal kegiatan hanya tersedia 3 UMKM.
3. Segera dibuatkan surat penundaan kegiatan yang bertanda tangan sekretariat Daerah.
4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penundaan kegiatan.
5. Acara Rakorda akan dibuka oleh bapak Wakil Gubernur.
6. Bunda Forum Anak Daerah (FAD) juga akan hadir dan memberikan sekapur sirih, buatkan surat terkait hal tersebut.

Pimpinan Rapat Kepala Dinas
Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

dr. Linae Victoria Aden, M., Mkes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680717 199903 2 006

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

NOTULEN

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Notulis : Tony Irawan, S.STP, MAP

Nama Kegiatan :

Rapat Informasi Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas P3APPKB provinsi Kalimantan Tengah

Hasil Kegiatan :

1. Penyampaian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan IPPD beserta suplemennya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target dalam pencapaian kinerja Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dan RENSTRA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan maksud dan tujuan :
 - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Penetapan Indikator Utama memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja yaitu :
 1. Spesifik;
 2. *Measurable*;
 3. *Achievable*;
 4. *Relevant*;
 5. *Timelines*;
5. Pimpinan Rapat juga menyampaikan dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum. 2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD. 3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja. 4. Kebutuhan statistik pemerintah. 5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Penutup, Acara ditutup oleh Pimpinan Rapat

Notulis,

Tony Irawan, S.STP, MAP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

DOKUMENTASI KEGIATAN

DAFTAR HADIR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Hari / Tanggal : 10 - 03 - 2023
Tempat : Dinas P3APPKB PROV KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Linea Victoria Aden, M.M.Kes	P	Kepala Dinas	1
2	Tony Irawan, S.STP., M.AP	L	Kasub Umum dan Kepegawaian	2
3	Ir. Evangelis, M.Si	L	Kepala Bidang	3
4	Mariana, SE	P	Kepala Bidang	4
5	Partiani, SKM., M.M.Kes	P	Kepala Bidang	5
6	Jumrah, SST	P	Kepala UPT	6
7	Drs. Murjani	L	Kopala Bidang	7
8	Drs. Achmad Hairudin, M.Si	L	Kopala Bidang	8
9	Nurhayati, SKM, M.Si	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	9
10	Yuni Setia Wati, SE, M.Si	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	10
11	Eni Priatminingsih, SH	P	Perencana Ahli Pertama	11
12	Sri Purnawati, S. Sos	P	Perencana Ahli Pertama	12
13	Indriyani, BA	P	Perencana Ahli Pertama	13
14	Rusilawaty	P	Perencana Ahli Pertama	14
15	Yenie, SE	P	Perencana Ahli Pertama	15
16	Irawaty, S.Th	P	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	16
17	Dileli Dharma Astoeti, SKM, MM	P	Perencana Ahli Muda	17
18	Yuni Hamsyah, S.ST	P	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	18
19	Elisa Phalentina, S.Psi	P	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	19
20	Mernel Aprians, SH	P	Penyuluh Masyarakat	20



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
21	Wilna Silvary, SE	P	Kepala Sub Bagian	21
22	Gheby Christina, SKM	P	Analisis Keluarga Berencana	22 
23	Martawati, S.Sos	P	Bendahara	23 
24	Eri Sri Wahyuni, SKM	P	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	24 
25	Siana Dewi Artha, ST	P	Perencana Ahli Muda	25 
26	Putu Ait Swardita, SE	L	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	26 
27	Riantono Hartaku, ST	L	Tenaga Administrasi	27 
28	Erwin	L	Petugas Kebersihan	28 



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Pergeseran Pagu Dinas P3APPKB
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Surat Undangan : Kabid, Tim Perencanaan Dinas P3APPKB
Waktu Sidang/Rapat : 10.00 WIB
Acara : 1. Membahas Pergeseran Pagu di setiap Bidang dan Sekretariat Dinas P3APPKB

Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : SURYANTO, Aks., M.Si
Sekretaris : -
Pencatat : Tim Perencanaan
Peserta Sidang/Rapat : Kepala Bidang dan Tim Perencanaan Bidang

Kegiatan Sidang/Rapat : Rapat Pergeseran Pagu Dinas P3APPKB, 13 Juni 2024

Bidang 1

Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	(Rp. 35.000.000)	Berkurang
Total		(Rp. 35.000.000)

Bidang 3

Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	(Rp. 50.000.000)	Berkurang
2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp. 50.000.000	Bertambah
Total		-

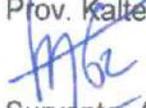
Bidang 4

Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	(Rp. 26.000.000)	Berkurang
2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	(Rp.20.250.000)	Berkurang
Total		(Rp. 46.250.000)

Bidang 5

Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Rp. 27.883.045)	Berkurang
2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	(Rp. 22.116.955)	Berkurang
Total		(Rp. 50.000.000)

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas P3APKB
Prov. Kalteng


Suryanto, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006

DOKUMENTASI RAPAT



Gambar 1 Rapat bersama Tim Perencanaan dan Bidang 1



Gambar 2 Rapat bersama Tim Perencanaan dan Bidang 3



Gambar 3 Rapat bersama Tim Perencanaan dan diwakili
Pit Kepala Bidang 4



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

NOTULEN

Sidang/Rapat	:	Rapat Penyusunan Risk Register Lingkup Dinas P3APPKB
Hari/Tanggal	:	Senin, 2 Januari 2023
Surat Undangan	:	Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana Bidang, Tim Perencanaan, Kasub Umum dan Kepegawaian, Kasub Keuangan
Waktu Sidang/Rapat	:	10.00 WIB
Acara	:	Pembahasan RISK REGISTER Dinas P3APPKB
Pimpinan Rapat	:	
Ketua	:	SURYANTO, Aks., M.Si
Sekretaris	:	-
Pencatat	:	Tim Perencanaan
Peserta Rapat	:	Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana Bidang, Tim Perencanaan, Kasub Umum dan Kepegawaian, Kasub Keuangan

Pembukaan :

Pelaksanaan Pembukaan rapat oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pengantar :

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu disusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusuna Risk Register :

Kontekstual :

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko

Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Risiko.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko.

3. Pengelolaan Risiko

Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) dengan pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

Hasil Draft Penyusunan Risk Register dari Bidang Teknis :

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi
a	b
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:
1	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah
2	Minimnya Penggunaan Anggaran yang Responsif Gender
3	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan
4	Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan
5	Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA
6	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak
7	Ketidaktimalan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga
8	Peningkatan Jumlah Anak
9	Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
10	Trauma Penggunaan Alat KB
11	Kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan
II	Risiko Operasional Sekretariat
1	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia
2	Kuota kelas pelatihan terbatas
3	Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu
III	Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan
1	Pengajuan anggaran Responsif Gender tidak sesuai kebutuhan
2	Program dan kegiatan di Tiap OPD belum responsif gender
3	Minimnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
4	Rendahnya pelaksanaan PUG di masyarakat
5	Ketidaksiapan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di tingkat Kab/kota
6	Pelaksanaan sosialisasi partisipasi perempuan belum optimal
3	Peserta kegiatan Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan yang mempunyai Industri Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
IV	Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi
1	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akurat
2	Data Gender dan Anak tidak Handal
3	Penyalahgunaan wewenang dengan memanipulasi data dalam Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak
V	Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
1	Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang KLA
2	Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA
3	Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik
4	Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan
3	Penyimpangan penentuan kriteria anak dari Forum Anak Daerah yang didelegasikan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Forum Anak Nasional
VI	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
1	Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)
2	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan
3	Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang terdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus
VII	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas
1	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK
2	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting
3	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen

4	Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK
5	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kearifan budaya lokal
6	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program.
7	Pelaksanaan kegiatan untuk sosialisasi stunting yang tidak sesuai dengan jenis intervensi (kewenangan) dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024
VIII	Risiko Operasional UPT PPA
1	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi
2	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi
3	Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan pada Rumah Perlindungan yang ditentukan tidak sesuai SOP Layanan penampungan Sementara Korban Kekerasan

Kesimpulan :

1. Menganalisa Identifikasi Risiko yang telah dikompilasi
2. Merencanakan tindak pengendalian dengan berkoordinasi kembali pada rapat selanjutnya untuk membahas pelaksanaan pengendalian yang dianggap efektif dan efisien

Penutup :

Pelaksanaan rapat ditutup pukul 12.30 WIB dengan ditutup langsung oleh Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pimpinan Rapat
 Sekretaris Dinas P3APPKB
 Prov. Kalteng

 Suryanto, AKs., M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19730108 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat TEPRALingkup Dinas P3APPKB
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Surat Undangan : Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana
Bidang, Tim Perencanaan, Bendahara
Waktu Sidang/Rapat : 10.00 WIB
Acara : 1. Pembahasan TEPRALTriwulan 2 dan Rencana Target Realisasi
Triwulan 3 Dinas P3APPKB
Pimpinan Rapat
Ketua : SURYANTO, Aks., M.Si
Sekretaris : -
Pencatat : Tim Perencanaan
Peserta Rapat : Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana
Bidang, Tim Perencanaan, Bendahara

Kegiatan Rapat : Rapat Pembahasan TEPRALDinas P3APPKB, 1 Juli 2024

NO	URAIAN	CAPAIAN
I	Belanja Operasi	16.931.573.320
	Realisasi Keuangan	5.703.662.116
	% Keuangan	33,69 %
	% Fisik	37,65 %
II	Belanja Modal	1.052.987.662
	Realisasi Keuangan	586.160.000
	% Keuangan	55,67 %
	% Fisik	56,84%
III	Pagu DP3APPKB	17.984.560.982
	Realisasi Keuangan	6.289.822.116
	% Keuangan	34,97 %
	% Fisik	38,85 %

REALISASI ANGGARAN APBD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 (Triwulan II)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			Keterangan
			Keuangan		Fisik	
			Keuangan	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	17.984.560.982	6.289.822.116	36,01	39,88	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.986.495.773	6.117.248.016	38,99	41,61	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.187.996.782	5.142.586.342	24,40	30,08	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.412.500	92.322.272	31,43	31,43	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877	10.236.600	65,49	65,49	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.046.968	20.332.910	37,70	42,46	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476	11.881.800	17,61	24,67	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.275.179	49.870.962	43,01	43,07	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.144.034.135	3.502.586.238	42,93	42,93	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.876.833	3.464.650.458	66,24	66,24	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	6.623.800	48,81	56,60	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302	31.311.980	-	-	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.231.906	-	-	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.231.906	-	10,47	12,44	

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.873.906	7.420.000	10,47	12,44	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.873.906	7.420.000	36,01	39,88	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.145.329.323	728.578.486	33,96	40,36	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132	5.165.800	21,58	21,58	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.574.400	550.606.500	61,14	63,66	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485	4.960.000	8,55	8,55	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000	1.590.000	99,38	99,38	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.133.129	17.384.600	28,91	45,54	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.942.077	148.871.586	16,17	23,56	Pelaksanaan Penganggaran PJD LN yang tidak terlaksana
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.134.100	-	-	20,21	Pelaksanaan Pengadaan aset Tak Berwujud/Aplikasi yang tidak terlaksana
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506	72.625.159	25,56	47,98	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456	54.160.000	98,73	100,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050	18.465.159	8,05	35,53	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.702.967.242	432.517.740	25,40	30,46	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452	6.877.200	50,19	50,19	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	319.577.648	86.516.810	27,07	46,93	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.686.142	339.123.730	24,76	26,42	

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.965.264	306.536.447	71,13	78,16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.004.900	29.531.130	27,34	48,49	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.645.953	14.171.847	24,58	33,26	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265.314.411	262.833.470	99,06	100,00	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.124.855.574	105.735.050	9,40	13,22	
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476	99.595.550	50,04	56,51	
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437	41.784.400	56,25	56,25	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600	57.811.150	80,31	98,21	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	52.778.439	-	-	-	
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	888.786.298	-	-	-	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	781.071.310	-	-	-	Dana Hibah BKOW tidak terlaksana secara fisik dan keuangan sebesar Rp 350.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	107.714.988	-	-	-	
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	6.139.500	16,58	97,71	

	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemerdayaan perempuan kewenangan provinsi	37.025.800	6.139.500	16,58	97,71	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	552.052.238	241.511.394	43,75	62,88	
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311	55.795.900	32,31	93,46	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102	13.259.900	26,33	78,22	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209	42.536.000	34,77	99,73	
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.059.781	90.176.594	39,20	39,20	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679	44.891.763	32,74	32,74	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102	45.284.831	48,71	48,71	
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	149.302.146	95.538.900	63,99	63,99	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146	95.538.900	93,38	93,38	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	46.985.000	-	-	-	Pelaksanaan Kegiatan hanya dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus/Bencana
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258.520.478	239.236.700	92,54	93,08	

4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	73.796.000	71.364.700	96,71	96,71
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000	71.364.700	96,71	96,71
4.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	167.872.000	90,88	91,63
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	167.872.000	90,88	91,63
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	217.530.460	30.192.100	13,88	20,36
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	217.530.460	30.192.100	13,88	20,36
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.673.010	-	-	1,50
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450	30.192.100	20,01	28,70
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913	92.705.642	14,55	17,92
6.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606	92.705.642	32,77	40,36
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	208.445.900	80.226.342	38,49	48,78
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.409.706	12.479.300	16,77	16,77
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307	-	-	-
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307	-	-	-

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	-	-	-
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.008.481.328	265.280.788	26,30	38,76
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	514.985.634	99.058.288	19,24	40,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741	2.526.600	2,63	49,38
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	418.858.893	96.531.688	23,05	38,51
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694	166.222.500	33,68	36,90
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.578.742	41.381.000	34,04	34,04
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952	124.841.500	33,57	37,83
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	998.065.209	172.574.100	17,29	21,30
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773	-	-	-
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773	-	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773	-	-	-
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-	-	-	-
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	64.222.990	-	-	-
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	27.883.045	-	-	-

	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.883.045	-	-	-	
9.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945	-	-	-	
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	36.339.945	-	-	-	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	781.857.446	172.574.100	22,07	27,19	
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	781.857.446	172.574.100	22,07	27,19	
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	781.857.446	172.574.100	22,07	27,19	
TOTAL		17.984.560.982	6.289.822.116	34,97	38,85	

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 – URUSAN PPPA

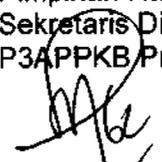
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024		Keterangan
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96	81,96	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 81,98
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,6	3,6	3,16	Realisasi Tahun 2023 3,5
3	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Indeks	81,94	81,94	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 81,98
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100 %	100 %	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 114,28
5	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,68	63,68	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 59,56
6	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	90	90	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 100

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 – URISAN PPKB

7	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	64,55	64,55	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 54,25
8	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15- 49 Tahun	2	2	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 2,29
9	Angka Prevalensi Kontrasepsi MoModernm Contraceptive (mPCR)	Persen	74,26	74,26	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 74,38
10	Persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persen	5,01	5,01	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 8,58
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Angka	18	18	BAD (Belum Ada Data)	Realisasi Tahun 2023 19,51

Permasalahan tidak tercapainya realisasi 50 % dikarenakan Keterlambatan proses SPJ karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas
P3APPKB/Prov. Kalteng


SURYANTO, AKs., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

DOKUMENTASI

Sekretariat DP3APPKB
Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, Febby, Ka, Ka, Ka, Ka, Nurul, Pak, Pak, Pak, PUTU, +62 852-1569-8029, +62 823-

SENIN

Pak Suryanto
Assalamualaikum
Selamat Pagi
Yth.

1. Bpk ibu Kabid
2. Kepala UPT
3. Bpk ibu kasubag dan Kasi UPT
4. PPTK
5. Perencana bidang
6. Tim perencana
7. Bendahara

Dimohon kehadirannya pada Rapat TERPRA lingkup DP3APPKB yg akan dilaksanakan pada
Hari : SENIN
Tanggal : 1 Juli 2024
Waktu : Jam 08.30 wib sd selesai
Tempat : Ruang Sekdis
Demikian disampaikan dan terima kasih 🙏🙏

Cc. Kadis P3APPKB





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id
PALANGKA RAYA - 73112

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	dr. LINDA VICTORIA ADEN, M.M.Kes	P	Kecdis	
2.	Suryanto, AKS, M.Si	L	Sekdis	
3.	Mariana	P	Kabid. KHP	
4.	Yuyun Wahyudi	L	Kabid PPKB	
5.	Musyoni	L	Kabid. Rehab	
6.	JUMRAH	P	Ka. UPT PPA	
7.	Sylvana Anethe	P	Kabid DHA	
8.	Sicra Dan Artha	P	JF. Perencana Murb	
9.	YUNI SETIA WATI	P	JTI. Analisis kebijakan dan mud	
10.	Wilma Silvany	P	Ksb. kea & aset	
11.	Herline	P	UPT PPA	
12.	Tony	L	Ksb. u dan k	
13.	HERO WALPATERA	L	Prakom Atasi Perfora	
14.	Martawun	P	Bendahara	
15.	Juliantie	P	UPT-PPA	
16.	Irawaty	P	Insur PPA	
17.	Diny Rezki Amelia	P	Analisis PP	
18.	Elisa Phalestina	P	Perencanaan Pertama	
19.	Ritu Auli Swardita	L	Penyusun Program anggaran & Pelaksana	
20.	Rosalin	P	Pelaksana	
21.	Januria	P	Pelaksana	
22.	Aniyani	P	Pelaksana	
23.	Alisnawati	P	Pelaksana	
24.	Riantono Hartaku	L	Staf	
25.	Nurul Hudaib R	P	- -	
26.	Vanessa Feni	P	- -	
27.	Ericc	L	- -	
28.	Rerka	P	- -	
29.	Melka	P	- -	

